

PENGAWASAN PAKAIAN BEKAS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh: Indra Wahyudi

Pembimbing: Abdul Sadad, S.Sos, M.si

Konsentrasi Kebijakan Publik - Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Department of Industry and Trade has the task of carrying out regional government affairs based on the principle of autonomy and assistance in the field of Industry and Trade and can be assigned to carry out the authority delegated by the government to the regions in the context of decentralization. Based on the data the researchers got when conducting research at the research location of the Department of Industry and Trade of Indragiri Hilir Regency regarding supervision regarding the prohibition of the sale of used clothing carried out by the Department of Industry and Trade, in the Manullang Supervision model theory, there were three variables that formed the link between Supervision and performance. namely Setting Standards, Conducting Measures of Assessment and Conducting Corrective Action, The research method used in this study is qualitative research. With the technique carried out, namely snow ball sampling, to the key informants in this study. In this writing, the informant was the Head of the Trade Department of the Department of Industry and Trade of Indragiri Hilir Regency, Secretary of the Department of Industry and Trade of Indragiri Hilir Regency. Then analyze the data and manage it. Based on the research and discussion that the researchers carried out in the field, it was found that Second hand Clothing Surveillance in Indragiri Hilir District had not been carried out optimally. This is because various factors that influence Supervision of this Regulation are difficult to carry out optimally.

Keywords: Supervision, Used Clothing in Inhil District

PENDAHULUAN

Aspek utama yang mendukung keberhasilan Otonomi Daerah yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja Pemerintah. Pengendalian (Control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (Audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Otonomi daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) dijelaskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Pengawasan mengacu pada suatu bentuk monitoring yang dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif melalui Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (social control). Penguatan fungsi pengendalian dilakukan melalui pembuatan system pengendalian internal yang memadai dan pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah (misalnya Inspektorat).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya memiliki dua tugas pokok yakni :

1. Dinas perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Table 1
Rata-rata Pendapatan Pedagang di
Pasar Pagi

No.	Banyaknya Pedagang	Pendapatan Perbulan	Jumlah
1	80	Rp. 3.500.000,-	Rp. 280.000.000,-
2	60	Rp. 4.000.000,-	Rp. 240.000.000,-
JUMLAH			Rp. 520.000.000,-

Table. 2
Rata-rata Pendapatan Pedagang di
Pasar Kayu Jati

No.	Banyaknya Pedagang	Pendapatan Perbulan	Jumlah
1	25	Rp. 5.000.000,-	Rp. 125.000.000,-
JUMLAH			Rp. 125.000.000,-

Table. 3
Rata-rata Pendapatan Pedagang
Dayang Suri

No.	Banyaknya Pedagang	Pendapatan Perbulan	Jumlah
1	30	Rp. 4.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
JUMLAH			Rp. 120.000.000,-

Sumber : dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Indragiri hilir 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pedagang pakaian bekas yang ada dikota tembilahan berjumlah 195. Pedagang yang berjualan di Pasar Pagi berjumlah 140 orang, pedagang yang berjualan dipasar Kayu Jati 25 orang dan pedagang yang berjualan di Pasar Dayang Suri berjumlah 30 orang.

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia mempunyai perbatasan laut dan juga perbatasan darat. Dengan adanya perbatasan darat maupun laut, memudahkan masyarakat Indonesia untuk berinteraksi dengan negara lain.

Masalah perdagangan pakaian bekas ini juga tidak menjadi sederhananya telah dikeluarkannya berbagai peraturan tadi. Hal itu disebabkan secara resmi keberadaan pasar-pasar jongkok yang menjual pakaian bekas itu telah menjadi salah satu program wisata unggulan kabupaten Indragiri Hilir, karena keberadaan pasar jongkok tersebut

telah menjadi daya tarik bagi para pengunjung dari daerah lain, baik dari Riau sendiri maupun Provinsi lain.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pakaian Bekas Di Kabupaten Indragiri Hilir?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengawasan Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir?

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mendapat penemuan baru guna memperkaya khasanah keilmuan di bidang Administrasi Publik.
2. Sebagai bahan kajian teoritis dalam upaya efektivitas Pengawasan Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Indragiri Hilir.

Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi atau sebagai bahan evaluasi terhadap Pengawasan Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bagi penulis, sebagai upaya pemahaman dan pengembangan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Selanjutnya sumbangan pemikiran untuk mengatasi masalah yang sama atau terkait di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Teori

Dalam melakukan penelitian diperlukan landasan teori yang digunakan sebagai berfikir untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang akan diteliti. Konsep teoritis yang dimaksud adalah untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca, agar nantinya tidak ada salah tanggap atau salah persepsi dari pembaca sekalian.

2. Manajemen

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi diperlukan sebuah manajemen yang baik. Manajemen adalah suatu proses dimana suatu kelompok secara kerjasama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut **Dalton E. MC Farland** dalam **Brantas (2009:7)** manajemen adalah suatu proses yang mana manajer sebagai pencipta, mengarahkan, memelihara dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia.

Menurut **Siswanto (2005:7)** mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan manajemen adalah suatu seni dan ilmu yang dibutuhkan dalam proses kegiatan mencspsi tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

Menurut **Sarundajang (2005:240)** pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pengawasan terhadap semua pekerjaan atau kegiatan, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyimpangan dar apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tujuan manajemen dilihat dari konsep organisasi didalam **Brantas (2009:13)** adalah :

1. Pedoman bagi Kebutuhan

Melalui penggambaran hasil-hasil akhir diwaktu yang akan datang, tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan pengarahan dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota organisasi. Dalam hal in, fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang "harus" dan "tidak harus" dilakukan.

2. Sumber Legitimasi

Tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya, dan samping itu, keberadaannya dikalangan kelompok-kelompok seperti pelanggan, politikus, pegawai, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Pengakuan atas legitimasi ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan disekitarnya.

3. Sumber Pelaksana

Bila tujuan dinyatakan secara jelas dan dipahami, hal ini akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksana kegiatan (prestasi) organisasi. Setelah organisasi menetapkan tujuan-tujuan dalam bidang-bidang yang didapat dikuantifikasikan seperti penjualan, posisi pasar, atau laba, derajat kesuksesan yang dicapai dapat dengan mudah diukur.

4. Sumber Motivasi

Tujuan organisasi dapat berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi pegawai yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. Fenomena ini tampak jelas dalam organisasi yang menawarkan bonus bagi pencapaian tingkat penjualan tertentu dan sebagainya yang dikaitkan secara langsung dengan laba tahunan.

5. Dasar Rasional Pengorganisasian

Dinyatakan secara sederhana tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan, pola penggunaan sumber daya, implementasi berbagai unsur perancangan organisasi: pola komunikasi, mekanisme pengawasan, departementalisasi dan sebagainya.

Tujuan-tujuan hendaknya ditetapkan secara logis, rasional, realitas dan idea berdasarkan fakta, data, kemampuan serta potensi yang dimiliki dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai social, agama, moral serta peraturan-peraturan pemerintah, agar tujuan perusahaan yang ditetapkan bermanfaat bagi masyarakat cukup visible untuk dicapai.

Menurut **George R. Terry** dalam **Manullang (2008:8)** fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

a) Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan (*planning*) merupakan suatu kegiatan dimana didalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki.

b) Fungsi Pengorganisasian
(*Organizing*)

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

c) Fungsi Penggerakkan
(*Actuating*)

Merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

d) Fungsi Pengawasan
(*Controlling*)

Pengawasan sebagai proses penentuan, apa saja yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Menurut **Handoko (2003:8)** mendefinisikan manajemen adalah proses dari beberapa kegiatan diantaranya :

- a) Perencanaan
- b) Pengorganisasian
- c) Pengarahan
- d) Pengawasan

3. Pengawasan

Menurut **Darwis dkk (2009:12)** perencanaan dan pengawasan laksana dua sisi dari mata uang yang sama, pengawasan dapat diartikan sebagai

proses pengamatan, pendekatan, pengendalian dan pengkoreksian dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan atau kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan (*controlling*) tidak mungkin dapat dijalankan tanpa ada rencana yang jelas, karena tidak ada pedoman apa yang akan diawasi. Sebaliknya apabila perencanaan (*planning*) tanpa diawasi akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, karena tidak ada alat untuk mencegahnya.

Menurut **Brantas (2009:191)** pengawasan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenaan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengkoordinasi antara kegiatan.

Menurut **Sujatmo (2003:17)** mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kekayaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, dan kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu.

Menurut **Harahap (2004:12)** adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti. Dalam pengertian ini pengawasan adalah tujuan setiap orang.

Winardi (2000:161) terdapat faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan :

- a. Sasaran individu dan organisasi biasanya berbeda, (maka dengan demikian perlu adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja kearah sasaran-sasaran organisatoris).
- b. Pengawasan diperlukan, disebabkan oleh karena terdapat adanya satu keterlambatan antara waktu dan sasaran dan sewaktu mereka direalisasikan.

Herlambang (2013:30) prinsip-prinsip dalam melakukan pengawasan adalah:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, harus dapat dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Misalnya, tentang waktu dan tugas pokok yang harus diselesaikan oleh staf harus dipantau oleh pimpinan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu.
- b. Pengawasan yang lemah akan menimbulkan penyelewengan wewenang dan akan mudah terjadi.
- c. Standar kinerja harus dijelaskan kepada semua lapisan staf, sehingga staf mengetahui bahwa setiap kinerja yang dilakukan staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan reward atau pengupahan kepada mereka yang dianggap mampu bekerja dengan baik.

Terry (2015:232) pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan dalam memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan atau potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.

Menurut **Lubis (1984:154)** pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki, rencana yang betapapun baiknya akan gagal sama sekali bilamana manajer tidak melakukan pengawasan.

Dalam setiap usaha pengawasan terdiri atas tindakan meliputi apakah segala sesuatu tercapai dan berjalan sesuai dengan yang telah dikeluarkan, pengawasan bertujuan untuk menunjukkan atau merumuskan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah agar tidak terulang lagi kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan serta kesalahan pengawasan bervariasi terhadap segala hal baik terhadap benda, manusia dan lainnya.

Fayol dalam Lubis (1984:154) mengatakan bahwa setiap pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan berdasarkan intruksi-intruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Darma S. S, (2004:21) mengatakan bahwa pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen, yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Departemenisasi* (Penyusunan Staf)
4. *Actuating* (Pengerakkan)
5. *Controlling* (Pengawasan)

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai tujuan. Demikian juga halnya dengan fungsi pengawasan, dimana pengawasan hanya mungkin dilakukan apabila fungsi-fungsi manajemen yang lain telah ada dan mendukung berjalannya pengawasan tersebut.

Menurut **Hasibuan (2005:245)** seorang manajer harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat diketahui dengan melalui proses control atau pengawasan, cara-cara pengawasan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer, manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.
- b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan ataupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang di khususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari

hasil atau standar yang diharapkan. Pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer.

Menurut **Nurcolis (2005:195)** pengawasan adalah kegiatan mengawasi, menilik, menjaga dan mengendalikan semua kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sesuai rencana yang ditetapkan. Dengan pengawasan maka kegiatan yang melenceng dari arah yang ditetapkan diluruskan, yang menyimpang dibetulkan dan yang berlawanan dibakar. Dengan demikian fungsi pengawasan bukan mencari-cari kesalahan tapi mengarahkan agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Menurut **Relawati (2012:107)** pengawasan (*controlling*) merupakan proses evaluasi bagi manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Jika terjadi penyimpangan maka pengawasan juga sekaligus mengadakan koreksi sehingga kegiatan dapat diarahkan kepada pencapaian organisasi.

Badrudin (2014:215) mengatakan pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses pelaksanaan manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Manullang (2012:173) menyatakan pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan merupakan sebuah aktivitas yang memungkinkan adanya intervensi positif dalam memeriksa arah yang diambil dan mengevaluasi hasil atau penyimpangan dari perencanaan sebelumnya, oleh karena itu perencanaan harus bersifat komprehensif dan terbuka terhadap berbagai hasil kinerja yang dilakukan. Menurut **Fathurrahman** dalam **Badrudin (2014:216)** mengemukakan prinsip yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pengawasan, yaitu :

1. Prinsip ilmiah, yakni kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses kegiatan, menggunakan alat perekam yang akurat untuk memperoleh data. Setiap kegiatan pengawasan dilaksanakan secara sistematis, berencana dan kontinyu.
2. Prinsip demokratis, yakni pengawasan yang dilakukan berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan penuh kehangatan, menunjung tinggi harga diri dan martabat serta bukan berdasarkan atasan dan bawahan.
3. Prinsip kerjasama, yakni mengembangkan usaha bersama dengan memberikan dukungan, mendorong dan memstimulasi sehingga merasa tumbuh bersama.
4. Prinsip konstruktif dan kreatif, yakni pengawasan dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi kreativitas dan menciptakan situasi yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan.

Menurut **Admosudirdjo (2015:63)** mengatakan bahwa pada pokoknya *controlling* atau

pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan.

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah :

- a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan.
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan.
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Menurut **Sukanto (2002:65)** pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut :

1. Adanya ukuran dan standar.
2. Penilaian pekerjaan yang dilakukan.
3. Pembetulan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

David (2003:141) juga menyarankan langkah-langkah mengefektifkan pengawasan dengan cara mengintegrasikan pengawasan dan perencanaan, membuat system pengawasan fleksibel, mengawasi secara akurat, membuat penentuan alur waktu pengawasan yang tetap dan dilakukan secara objektif.

Untuk mendapatkan suatu system pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. **Manullang (2012:174)** mengemukakan bahwa suatu system pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.
- c. Fleksibel, ini berarti bahwa system pengawasan itu tetap dapat dipergunakan meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
- d. Dapat merefleksir organisasi.
- e. Ekonomis.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Selanjutnya menurut **Soeharyo dan Effendi (2003:101)** prinsip-prinsip pengawasan antara lain :

1. Objektif dan menghasilkan.
2. Pengawasan berpedoman pada kebijakan yang berlaku.
3. Preventif.
4. Pengawasan bukan tujuan.
5. Efisiensi.
6. Menentukan apa yang salah.
7. Tindak lanjut.

Menurut **Manullang (2012:176)** ada empat macam penggolongan jenis pengawasan, yaitu :

- a) Waktu pengawasan
Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas :
 1. Pengawasan *preventif*
Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan

atau *deviation*. Jadi, diadakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari.

2. Pengawasan *represif*
Pengawasan yang dilakukan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.
- b) Objek pengawasan
Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas dibidang pengawasan sebagai berikut :
 1. Produksi
 2. Keuangan
 3. Waktu
 4. Manusia dan kegiatan-kegiatannya
- c) Subjek pengawasan
Pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas :
 1. Pengawasan *intern*,
pengawasan ini dilakukan oleh atasan oleh petugas yang bersangkutan. Oleh karena itu pengawasan ini disebut sebagai formal sebab yang melakukan pengawasan adalah orang-orang yang berwenang.
 2. Pengawasan *ekstern*,
pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar organisasi yang bersangkutan, pengawasan ini sering disebut juga dengan pengawasan social atau pengawasan informal.
- d) Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan
Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta

guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas :

1. *Personal Observation* (personal inspection)
2. *Oral Report* (laporan lisan)
3. *Written Report* (laporan tertulis)
4. *Control By Exception*

Brantas (2009:191) didalam bukunya mengatakan tujuan pengawasan adalah :

- a. Suatu proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.
- d. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak adilan.
- e. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak adilan.
- f. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
- g. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas organisasi.
- h. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
- i. Memberi opini atas kinerja organisasi.
- j. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
- k. Menciptakan terwujudnya Pemerintahan yang bersih.

Jadi dalam melakukan pengawasan tidaklah semata-mata untuk mencari kesalahan-kesalahan,

tetapi untuk mengoreksi dan memperbaiki segala tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Inilah yang sebenarnya merupakan hakekat dari tujuan pengawasan.

Menurut **Tunggal (2002:343)** pengawasan adalah proses memastikan aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Sehingga tidak terjadi penyimpangan. Sedangkan menurut **Winardi (2000:585)** pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Menurut **Brantas (2009:195)** sifat dan waktu dalam pengawasan di bedakan atas :

1. *Preventive Control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
 - a. Menentukan proses pelaksanaan kerja.
 - b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu.
 - c. Menjelaskan cara pelaksanaan pekerja itu.
 - d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan.
 - e. Menentukan jabatan, *job description* *author*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
 - f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.
2. *Respressive Control* adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan

dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Respressive Control* ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara hasil dan rencana.
- b. Menganalisa sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikan.
- c. Memberikan penilaian terhadap pelaksana jika perlu dikenakan sanksi dan hukuman kepadanya.
- d. Menilai kembali prosedur pelaksanaan yang ada.
- e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat petugas pelaksana.
- f. Jika perlu meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelaksana melalui *training* atau *education*.

Menurut **Manullang (2012:184)** dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

- a. Menetapkan alat pengukuran (standar)
Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Dalam garis besar, jenis-jenis pengawasan dapat

digolongkan kedalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Standar dalam bentuk fisik
 - a. Kuantitas hasil produksi
 - b. Kualitas hasil produksi
 - c. Waktu
2. Standar dalam bentuk uang
 - a. Standar biaya
 - b. Standar penghasilan
 - c. Standar investasi
- b. Mengadakan penilaian (*evaluate*)
Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan demikian, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan (*actual resurt*) dengan alat pengukur (standar).
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Hal pertama yang perlu dianalisis adalah apa yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas, ketika sudah diketahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, barulah tindakan perbaikan diambil.

Beberapa asas-asas pengawasan menurut **Koontz dan Donnel (2005:234)**, yaitu :

1. Pengawasan harus ditunjukkan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
2. Pengawasan itu evisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lain diluar dugaan.
3. Pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer

- bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Pengawasan yang efektif harus ditunjuk kearah yang penegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik bila waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
 5. Teknik kontrol yang efektif mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik.
 6. Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susuna rencana.
 7. Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.
 8. Pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer.
 9. Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
 10. Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
 11. Efisien dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor kekecualian.
 12. Pengawasan harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan.
 13. Pengawasan dapat dilakukan, apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan planning, organisasi.

Pengawasan berdasarkan pengecualian adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung atau tidak langsung oleh manajer. Pengawasan dilakukan oleh badan-badan yang berkompeten sebagaimana telah disampaikan, dengan pemantauan pengamatan terhadap pekerjaan serta hasil kerja para birokrat. **Saffi (2010:84).**

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin dalam perencanaan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi pengawasan adalah memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari suatu rencana sehingga dapat diharapkan hasil yang maksimal. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. **Inu Kencana (2010:82).**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara

menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan peneliti tentang Pengawasan Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Kota Tembilahan, maka disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir kota Tembilahan meliputi:
 - a. Menetapkan standar tugas pengawasan Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir Kota Tembilahan dilaksanakan melalui pembinaan/penyuluhan.
 - b. Melakukan tindakan penilaian yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir Kota Tembilahan belum mencapai optimal dimana masih ditemukan nya pedagang yang menjual pakaian bekas di beberapa pasar di Tembilahan. Pengawasan Pakaian Bekas Ilegal Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Indragiri Hilir Tembilahan Kota belum sepenuhnya optimal , tetapi dari pihak dinas sendiri mengatakan dalam hal melakukan pengawasan terhadap pakaian bekas tersebut. Sudah banyak dilakukan ke lapangan terutama berasal dari dalam organisasi itu sendiri, ini dapat dilihat dari standar pengawasan, pembagian tugas yang sudah maksimal serta sanksi yang diberikan

kepada pihak pedagang tersebut.

- a. Melakukan tindakan perbaikan dengan menerapkan sanksi bagi pedagang yang menjual pakaian bekas sudah tegas dimana sanksi yang diterapkan berupa sanksi administrasi berupa peringatan dan penyitaan, disertai tindakan pembongkaran/pencabutan izin usaha.
2. Faktor yang mempengaruhi pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir di Kota Tembilahan antara lain :
 - a. Kemampuan dan sikap pelaksana pengawas yang belum melaksanakan pengawasan pada setiap tempat perdagangan yang berjualan pakaian bekas. Kemampuan dan sikap pelaksana pengawasan dilapangan pada tempat perdagangan berjualan petugas sering tidak turun kelapangan.
 - b. Sarana dan Prasarana pengawasan yang belum memadai atau mendukung untuk melakukan pengawasan seperti, belum tersedianya pos pengawasan di pasar-pasar tradisional tembilahan kota.
 - c. Koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait yang belum melakukan komunikasi dalam mendukung Larangan Pakaian bekas ini menjadi kurang efektif, dan koordinsi di antara instansi hanya bersifat insidental

(mendadak) apabila dilakukan operasi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirdjo. 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Yogyakarta: Mediatara. Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Darwis, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: CV. WitraIrzami.
- David, Berry. 2003. *Pokok-Pokok Pikir dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Darma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Handoko, T, Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan. 2005. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen (cara mudah memahami manajemen)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing..
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nurcolis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen "pendekatan aplikasi bidang pertanian"*. Malang: Universitas Muhamadiyah.
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Soeharyo, Salamoen dan Nasri Effendi. 2003. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan RI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung: MandarMaju
- Sarundajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Katahasta Pustaka
- Sujatmo. 2002. *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Winardi, Gunawan. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT.Rineka Cipta..
- Widjaja. Tunggal, Amin. 2002. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.